

Integrasi Ekonomi pada Desa Wisata Sumber Maron

Economic Integration on Sumber Maron Village

Purnomo

Senior Advisor, Social Investment Indonesia

Email korespondensi: purnomo@socialinvestment.id

Lilik Sugirahayu

Product Innovation & Project Development Team Leader,
Social Investment Indonesia

Email korespondensi: liliksugirahayu@socialinvestment.id

Diterima: 30 Juni 2024 | Direvisi: 6 Juli 2025 | Disetujui: 8 Juli 2025 |

Publikasi Online: 1 Oktober 2025

CANTING

Indonesian Community Development and Social Investment Journal

ISSN 3110-3057

DOI : <https://doi.org/10.64895/fmba3t85>

Volume 1 Number 1

<https://canting.socialinvestment.id>

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan konsep embeddedness dan bentuk integrasi ekonomi ala Polanyi di Desa Wisata Sumber Maron, Karangsono, Malang. Berbeda dengan asumsi pasar bebas, aktivitas ekonomi di desa ini tidak digerakkan semata oleh logika keuntungan, melainkan sangat tertanam dalam struktur sosial, norma budaya, dan kelembagaan lokal yang kuat. Model dominan adalah resiprositas, terlihat dari praktik gotong royong dalam pembangunan fasilitas wisata dan harmoni antar pedagang. Redistribusi terjadi melalui peran sentral BUMDes yang mengelola pendapatan kolektif untuk pembangunan dan kesejahteraan warga. Pertukaran pasar hadir namun dibatasi oleh kesepakatan dan nilai-nilai komunitas. Studi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi Wisata Sumber Maron bergantung pada penguatan solidaritas sosial dan institusi lokal, menawarkan model pembangunan desa yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Desa Wisata, Partisipasi, Pengembangan Ekonomi Lokal, Ekonomi Inklusif, Ekonomi Komunitas

Abstract

This study analyzes the application of the concept of embeddedness and Polanyi's form of economic integration in the Sumber Maron Tourism Village, Karangsono, Malang. In contrast to the assumption of a free market, economic activity in this village is not driven solely by the logic of profit, but is deeply embedded in strong social structures, cultural norms, and local institutions. The dominant model is reciprocity, seen from the practice of mutual cooperation in the development of tourism facilities

and harmony between traders. Redistribution occurs through the central role of BUMDes which manages collective income for the development and welfare of residents. Market exchange is present but is limited by community agreements and values. This study shows that the sustainability of the Sumber Maron tourism economy depends on strengthening social solidarity and local institutions, offering an inclusive and equitable village development model.

Keywords: Tourism Villages, Participation, Local Economic Development, Inclusive Economy, Community Economic

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perkembangan desa wisata di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dalam satu dekade terakhir sebagai bagian dari strategi nasional untuk membangun ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), hingga tahun 2023 terdapat lebih dari 2.300 desa wisata yang terdaftar dalam jaringan desa wisata nasional, dengan lebih dari 500 desa berada dalam kategori berkembang dan maju (Kemenparekraf, 2023). Salah satu desa yang mengalami transformasi signifikan adalah Desa Karangsuko, khususnya di kawasan Wisata Sumber Maron, Kabupaten Malang.

Wisata Sumber Maron mengalami lonjakan kunjungan wisatawan dari hanya sekitar 10.000 pengunjung per tahun pada 2015 menjadi lebih dari 200.000 pengunjung per tahun pada 2023 (Yuliani, 2022). Lonjakan ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga pada transformasi struktur ekonomi desa. Sebelum pengembangan wisata, lebih dari 70% penduduk Desa Karangsuko bergantung pada pertanian dan buruh tani sebagai mata pencaharian utama. Namun, sejak 2020, tercatat bahwa lebih dari 60% penduduk usia produktif terlibat dalam sektor jasa wisata dan UMKM pendukungnya, seperti usaha makanan, penyewaan alat rekreasi, homestay, dan parkir wisata (Disparbud Malang, 2023).

Pendapatan desa juga meningkat secara signifikan. Berdasarkan laporan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Agung, total pendapatan desa dari sektor wisata mencapai Rp 1,2 miliar pada tahun 2023, naik dari hanya sekitar Rp 150 juta pada tahun 2016. Dana ini kemudian didistribusikan ke berbagai program sosial, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata bukan hanya menjadi alternatif ekonomi baru, tetapi juga menciptakan ekosistem pembangunan yang melibatkan warga secara aktif dan kolektif (Yuliani, 2022; Hidayat, 2020).

Namun yang menarik, transformasi ekonomi di kawasan wisata Sumber Maron tidak digerakkan oleh logika pasar murni, melainkan oleh relasi sosial dan nilai gotong royong yang terstruktur secara kelembagaan. Sebagai contoh, lebih dari 85% pedagang di area wisata merupakan warga lokal yang direkrut melalui musyawarah desa dan dibina oleh paguyuban pedagang (Zulaikha, 2021). Kegiatan

gotong royong dalam pemeliharaan fasilitas, kebersihan lingkungan, dan keamanan dilakukan rutin setiap minggu dan melibatkan lebih dari 300 warga secara sukarela. Hal ini memperkuat argumen bahwa ekonomi lokal yang tertanam dalam struktur sosial memiliki daya tahan dan legitimasi yang tinggi di tingkat komunitas.

Dengan data-data ini, terlihat bahwa fenomena Sumber Maron dapat menjadi objek kajian penting dalam melihat bagaimana keterlekatan ekonomi (*embeddedness*) dan bentuk integrasi ekonomi non-pasar seperti resiprositas dan redistribusi memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap dinamika ini sangat penting untuk menjawab tantangan umum yang dihadapi banyak desa wisata di Indonesia: bagaimana tumbuh secara ekonomi tanpa kehilangan kohesi sosial dan kontrol komunitas terhadap sumber dayanya sendiri (Polanyi, 1944; Granovetter, 1985).

1.2. Urgensi Penerapan Konsep *Embeddedness* dan Integrasi Ekonomi Polanyi dalam Konsep Desa Wisata

Di tengah arus globalisasi dan penetrasi kapitalisme ke ruang-ruang desa, banyak desa wisata mengalami proses *disembedding*, yaitu pelepasan aktivitas ekonomi dari struktur sosial, yang berdampak pada komersialisasi, eksklusivitas sosial, dan hilangnya kendali warga atas sumber daya lokal (Polanyi, 1944; Vel & Bedner, 2015). Dalam konteks ini, Sumber Maron justru menunjukkan arah sebaliknya: penguatan ekonomi dilakukan melalui mekanisme sosial seperti gotong royong, musyawarah desa, dan peran BUMDes dalam redistribusi manfaat ekonomi secara kolektif. Pola ini menegaskan pentingnya menempatkan ekonomi dalam kerangka relasional, bukan sekadar transaksional.

Dengan menerapkan kerangka integrasi ekonomi ala Polanyi—yang membedakan tiga bentuk utama yaitu resiprositas, redistribusi, dan pertukaran pasar (Polanyi, 1957)—penelitian ini menjadi krusial dalam mengungkap bagaimana ketiga bentuk integrasi tersebut berjalan simultan dan saling melengkapi dalam konteks ekonomi komunitas. Pendekatan ini juga menjawab kebutuhan akan model pembangunan desa yang kontekstual, adil, dan berkelanjutan secara sosial dan ekologis (Sumaryono, 2018; Hidayat, 2020).

1.3. Rumusan Masalah

Berangkat dari konteks di atas, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana kegiatan ekonomi di Desa Wisata Sumber Maron tertanam (*embedded*) dalam struktur sosial dan nilai lokal masyarakat? Bagaimana bentuk-bentuk integrasi ekonomi yang diuraikan oleh Polanyi—resiprositas, redistribusi, dan pertukaran pasar—terwujud dalam praktik sehari-hari masyarakat

desa? Serta, bagaimana struktur kelembagaan lokal mengelola distribusi manfaat ekonomi agar menciptakan keberlanjutan sosial dan lingkungan?

Permasalahan ini menjadi relevan karena banyak desa wisata yang gagal mempertahankan nilai sosial dan budaya lokal akibat dominasi logika pasar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola integrasi ekonomi yang memperkuat komunitas lokal menjadi kebutuhan penting dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan desa yang berkeadilan (Granovetter, 1985; Gunawan, 2019).

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana kegiatan ekonomi di Kawasan Wisata Sumber Maron tertanam dalam struktur sosial dan nilai lokal masyarakat desa.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi bentuk-bentuk integrasi ekonomi – resiprositas, redistribusi, dan pertukaran pasar – yang berjalan dalam praktik pengelolaan wisata di desa tersebut.
3. Menggambarkan peran kelembagaan lokal seperti BUMDes dan paguyuban warga dalam mengelola sistem distribusi manfaat ekonomi secara kolektif dan berkeadilan.
4. Menyediakan pembelajaran konseptual dan praktis untuk pengembangan ekonomi komunitas berbasis wisata di desa lain dengan karakteristik serupa.

1.5. Kebaruan (Novelty)

Penelitian ini menawarkan kebaruan teoritis dan empiris dalam tiga aspek utama. Pertama, secara teoritis, kajian ini menerapkan secara integratif konsep *embeddedness* dan bentuk integrasi ekonomi ala Polanyi pada studi kasus desa wisata, yang selama ini lebih banyak dianalisis dari perspektif ekonomi pembangunan konvensional. Kedua, secara metodologis, studi ini menggabungkan analisis kelembagaan dan nilai sosial dalam menilai keberlanjutan ekonomi komunitas, bukan sekadar indikator ekonomi formal. Ketiga, secara praktis, temuan dari Sumber Maron memberikan alternatif model pengelolaan desa wisata berbasis komunitas yang berakar pada solidaritas sosial, nilai lokal, dan tata kelola kolektif yang partisipatif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas aplikasi teori Polanyi dalam konteks ekonomi desa kontemporer di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi bagi diskursus pembangunan berkelanjutan yang berbasis komunitas dan budaya lokal (Polanyi, 1957; Zulaikha, 2021).

2. Tinjauan Teoretis

2.1. Teori *Embeddedness* dalam Sosiologi Ekonomi

Konsep *embeddedness* diperkenalkan oleh Karl Polanyi dalam karya klasiknya *The Great Transformation* (1944), yang mengkritik keras ekonomi pasar bebas yang

berkembang pada abad ke-19. Polanyi menyatakan bahwa dalam masyarakat pra-industri, ekonomi tidak pernah berdiri sendiri sebagai sistem yang otonom. Sebaliknya, ia selalu tertanam dalam struktur sosial, budaya, dan kelembagaan komunitas. Dalam konteks ini, ekonomi tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pandangan ini bertolak belakang dengan asumsi ekonomi neoklasik yang memisahkan ekonomi dari masyarakat.

Polanyi menyoroti bahwa upaya untuk menciptakan pasar bebas yang sepenuhnya otonom dari kontrol sosial dan politik justru menghasilkan instabilitas sosial. Ia menyebut fenomena ini sebagai *disembedding*, yakni pelepasan ekonomi dari masyarakat yang pada akhirnya mengancam tatanan sosial. Menurut Polanyi, pasar yang tidak diregulasikan akan mereduksi manusia, tanah, dan uang menjadi “komoditas semu” (*fictitious commodities*) yang berdampak merusak terhadap kesejahteraan masyarakat (Polanyi, 1944).

Michael Granovetter (1985), dalam artikelnya yang berpengaruh *Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness*, memperluas pemikiran Polanyi dengan menjelaskan bahwa bahkan dalam sistem ekonomi modern, tindakan ekonomi individu tetap dipengaruhi secara mendalam oleh jaringan sosial. Granovetter menunjukkan bahwa aktor ekonomi tidak bertindak secara rasional dan terisolasi sebagaimana diasumsikan oleh teori ekonomi neoklasik, tetapi selalu berada dalam jalinan relasi interpersonal yang membentuk kepercayaan, informasi, dan ekspektasi.

Dalam studi-studi kontemporer, *embeddedness* tidak hanya dipahami sebagai keterlekatan pada norma atau budaya, tetapi juga mencakup peran struktur sosial dan institusi dalam membentuk logika ekonomi lokal. Misalnya, hubungan antara petani dan tengkulak, atau antara pelaku usaha kecil dengan koperasi desa, mencerminkan proses *embeddedness* di mana ekonomi dijalankan dalam konteks relasional yang kompleks (Uzzi, 1996). Oleh karena itu, teori *embeddedness* menjadi alat analisis penting dalam memahami dinamika ekonomi desa dan peran jaringan sosial dalam menopang sistem ekonomi lokal.

2.2. Tiga Bentuk Integrasi Ekonomi ala Polanyi

Polanyi (1957) mengembangkan kerangka konseptual yang membedakan tiga cara utama di mana kegiatan ekonomi terintegrasi dalam masyarakat: resiprositas, redistribusi, dan pertukaran pasar. Resiprositas merujuk pada bentuk pertukaran yang dilakukan secara timbal balik di antara individu atau kelompok dalam jaringan sosial yang simetris. Ini biasanya terjadi dalam komunitas kecil atau masyarakat adat, di mana pertukaran dilakukan berdasarkan norma moral dan relasi sosial, bukan motivasi keuntungan.

Redistribusi terjadi ketika suatu otoritas pusat – seperti kepala suku, lembaga adat, atau negara – mengumpulkan sumber daya dari masyarakat dan

mendistribusikannya kembali. Model ini menekankan struktur hierarkis dan memerlukan lembaga yang memegang kekuasaan administratif. Dalam banyak masyarakat desa, bentuk redistribusi masih berfungsi melalui lembaga seperti desa adat, BUMDes, atau kelompok tani, di mana hasil pertanian atau pendapatan wisata didistribusikan untuk kepentingan bersama (Dalton, 1961).

Bentuk ketiga, yaitu pertukaran pasar, adalah transaksi ekonomi yang berlangsung secara bebas melalui mekanisme harga yang terbentuk oleh permintaan dan penawaran. Bentuk ini lebih umum dijumpai dalam masyarakat kapitalis modern dan diasosiasikan dengan prinsip rasionalitas dan efisiensi. Namun Polanyi mengingatkan bahwa dominasi pertukaran pasar tanpa kontrol sosial akan mengancam integrasi sosial dan keberlanjutan komunitas (Polanyi, 1957).

Dalam praktiknya, ketiga bentuk integrasi ini sering kali muncul secara bersamaan dan saling bertumpang tindih. Misalnya, dalam konteks desa wisata, penjualan makanan atau tiket masuk mencerminkan pertukaran pasar, sedangkan kerja sama antarwarga dalam menjaga kebersihan lingkungan atau pengelolaan parkir menunjukkan bentuk resiprositas. Dana yang dikumpulkan oleh lembaga desa dan dialokasikan kembali untuk pembangunan sosial merupakan contoh dari redistribusi. Pendekatan Polanyi memungkinkan analisis yang lebih kompleks dan kontekstual terhadap ekonomi komunitas.

Penerapan kerangka ini sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana masyarakat desa masih mempertahankan struktur sosial yang kuat dan sistem ekonomi berbasis nilai kolektif. Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam ekonomi pedesaan, seperti di Bali, NTT, atau Jawa, bentuk resiprositas dan redistribusi sering kali lebih dominan daripada logika pasar murni (Geertz, 1963; Vel & Bedner, 2015). Ini menegaskan bahwa pemisahan antara ekonomi dan masyarakat adalah ilusi yang tidak berlaku dalam praktik komunitas lokal.

2.3. Ekonomi Komunitas dan Desa Wisata

Konsep ekonomi komunitas merujuk pada sistem ekonomi yang berbasis pada partisipasi warga, kontrol lokal, dan orientasi pada kesejahteraan kolektif. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap kegagalan model ekonomi berbasis pasar bebas dalam menciptakan keadilan sosial di tingkat lokal. Dalam konteks desa wisata, ekonomi komunitas memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal (sumber daya alam, budaya, dan tenaga kerja) dengan cara yang tidak merusak integrasi sosial (Sumaryono, 2018).

Desa wisata bukan sekadar tempat kunjungan, tetapi juga sistem sosial yang mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam merancang, mengelola, dan memperoleh manfaat dari kegiatan wisata. Model ini memerlukan adanya penguatan modal sosial, seperti kepercayaan, solidaritas, dan jaringan kerja sama antarwarga. Studi oleh Hidayat (2020) menegaskan bahwa desa wisata yang berhasil ditopang

oleh struktur kelembagaan lokal yang memungkinkan redistribusi manfaat ekonomi secara adil, seperti koperasi wisata, BUMDes, atau kelompok sadar wisata.

Salah satu kunci keberhasilan desa wisata berbasis komunitas adalah keberadaan kelembagaan yang mampu mengatur distribusi manfaat ekonomi dan menjaga keterlibatan warga. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai pengatur sekaligus penjamin keberlanjutan. Di banyak tempat, model ini ditopang oleh bentuk-bentuk resiprositas informal seperti gotong royong, kerja bakti, atau sistem ronda yang berperan dalam menjaga lingkungan wisata tetap aman dan bersih (Gunawan, 2019).

Ekonomi komunitas dalam konteks desa wisata juga melibatkan dimensi kultural. Nilai-nilai lokal, seperti kearifan adat dan norma agama, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi komunitas tidak sekadar bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertahankan identitas sosial dan budaya desa. Model ini konsisten dengan kerangka *embeddedness*, karena kegiatan ekonomi berlangsung dalam dan melalui struktur sosial yang telah ada (Zulaikha, 2021).

Dengan demikian, ekonomi komunitas dalam bentuk desa wisata dapat dilihat sebagai praktik kontemporer dari integrasi ekonomi ala Polanyi, di mana resiprositas dan redistribusi tetap memainkan peran dominan, meskipun pertukaran pasar juga hadir. Analisis yang menggunakan kerangka ini dapat membantu membedakan antara desa wisata yang terjebak dalam eksploitasi pasar dengan desa wisata yang tumbuh melalui penguatan komunitas dan institusi lokal.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar integrasi antara teori sosiologi ekonomi klasik dan fenomena kontemporer transformasi ekonomi komunitas di tingkat desa. Sebagai pendekatan konseptual utama, penelitian ini mengacu pada teori *embeddedness* yang pertama kali diperkenalkan oleh Karl Polanyi dalam karyanya *The Great Transformation* (1944), serta diperluas oleh Michael Granovetter melalui artikelnya yang berpengaruh *Economic Action and Social Structure* (1985). Inti dari teori ini adalah bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipahami sebagai sistem yang terpisah atau otonom dari masyarakat, melainkan selalu “tertanam” dalam struktur sosial, budaya, dan kelembagaan.

Polanyi menekankan bahwa dalam masyarakat pra-industri, ekonomi tidak berdiri sebagai institusi yang otonom, tetapi melekat erat pada norma sosial dan pola relasi timbal balik antarindividu. Ketika sistem pasar mulai mengklaim otonomi dan melepas diri dari kendali sosial, terjadilah proses *disembedding* yang menurutnya membawa kerusakan pada tatanan sosial. Melalui analisis historisnya, Polanyi (1957) juga mengembangkan tipologi tiga bentuk integrasi ekonomi dalam masyarakat: (1) resiprositas, yaitu bentuk pertukaran sosial yang berlangsung antara individu atau

kelompok berdasarkan relasi simetris dan norma timbal balik; (2) redistribusi, yaitu pola pengumpulan dan pendistribusian kembali sumber daya oleh otoritas pusat seperti negara, kepala adat, atau lembaga komunitas; dan (3) pertukaran pasar, yaitu interaksi ekonomi yang ditentukan oleh mekanisme harga melalui prinsip penawaran dan permintaan.

Granovetter (1985), dalam perluasannya atas pemikiran Polanyi, berargumen bahwa bahkan dalam masyarakat modern yang sangat terdiferensiasi sekalipun, tindakan ekonomi masih sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial yang kompleks. Ia menunjukkan bahwa relasi interpersonal dan norma sosial memediasi akses terhadap informasi, pembentukan kepercayaan, serta proses pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, gagasan *embeddedness* tidak hanya relevan dalam konteks masyarakat tradisional, tetapi juga menjadi lensa kritis dalam memahami bagaimana ekonomi tetap bersifat sosial dalam dunia modern.

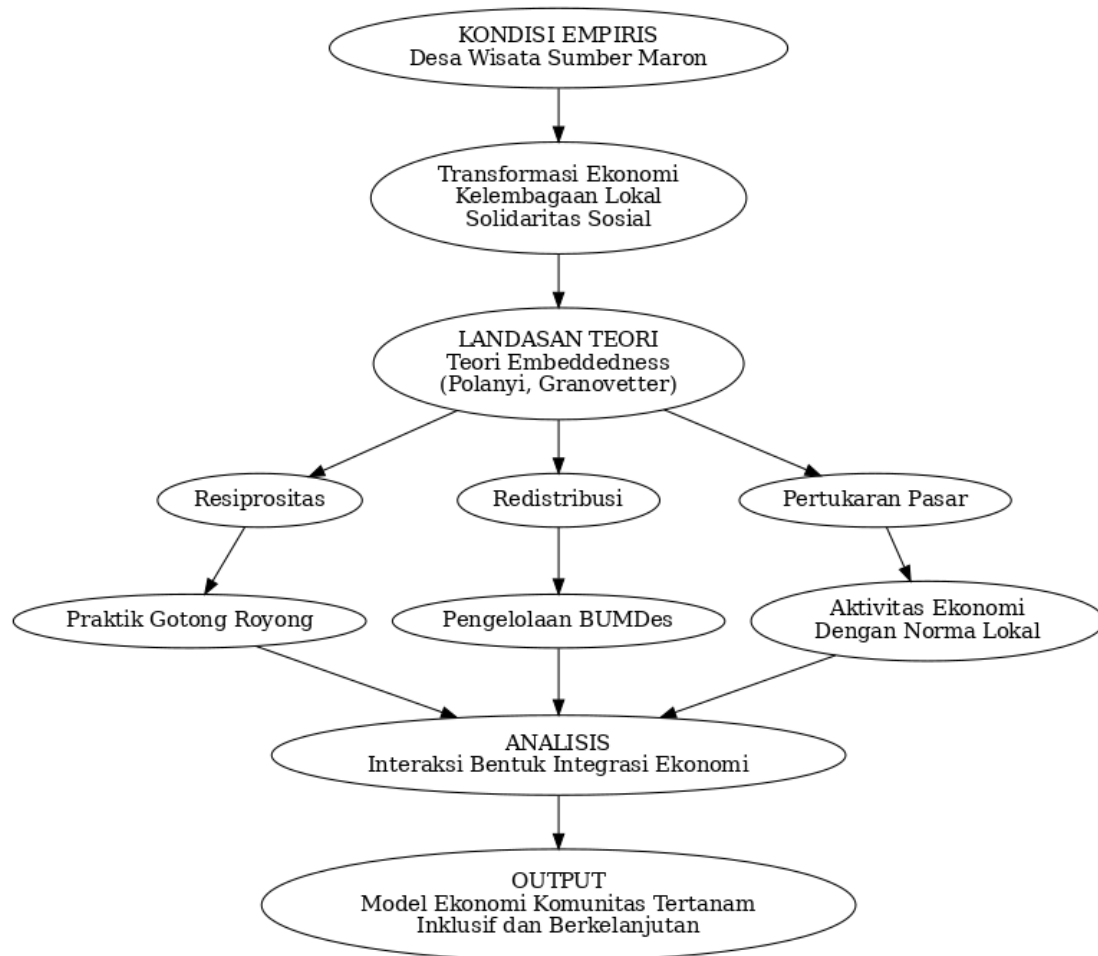
Konsepsi teoritis ini kemudian diuji dalam konteks empirik Desa Wisata Sumber Maron di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang telah mengalami transformasi signifikan dari ekonomi agraris ke ekonomi berbasis wisata alam dan jasa komunitas. Dalam proses transformasi tersebut, desa ini menunjukkan karakteristik khas dari sistem ekonomi terlekat/tertanam (*embedded economy*): kegiatan wisata dikelola bersama oleh warga, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, dan distribusi manfaat diatur melalui kelembagaan lokal seperti BUMDes dan paguyuban pedagang. Lebih dari sekadar pergeseran sektor ekonomi, Sumber Maron merepresentasikan integrasi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kohesi sosial, dan penguatan institusi lokal.

Fakta-fakta empirik ini menjadi titik pijak untuk menguji validitas dan relevansi teori *embeddedness* serta bentuk-bentuk integrasi ekonomi ala Polanyi dalam praktik ekonomi komunitas kontemporer. Penelitian ini memegang asumsi bahwa aktivitas ekonomi di komunitas desa tidak sepenuhnya digerakkan oleh logika pasar, tetapi lebih banyak ditopang oleh kekuatan sosial seperti norma lokal, nilai gotong royong, serta solidaritas dan jaringan informal antarwarga. Dengan demikian, resiprositas dan redistribusi diperkirakan masih menjadi bentuk dominan dari integrasi ekonomi yang terjadi, sementara pertukaran pasar tetap hadir tetapi dalam batas-batas yang dikendalikan oleh norma dan kesepakatan kolektif.

Dalam kerangka ini, fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, menelaah bagaimana aktivitas ekonomi di Sumber Maron terlekat/ tertanam dalam struktur sosial dan budaya lokal, sehingga memungkinkan ekonomi berkembang tanpa menimbulkan disintegrasi sosial. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk integrasi ekonomi resiprositas, redistribusi, dan pertukaran pasar berlangsung secara simultan dan saling melengkapi. Ketiga,

menggali peran kelembagaan lokal – seperti BUMDes, paguyuban, dan musyawarah warga – dalam menciptakan tata kelola ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dengan pendekatan tersebut, kerangka pemikiran ini tidak hanya memfasilitasi analisis terhadap dinamika ekonomi komunitas dalam studi kasus Sumber Maron, tetapi juga membuka ruang refleksi untuk pembangunan desa wisata di Indonesia yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis pada kekuatan sosial internal masyarakatnya.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang difokuskan pada analisis struktur ekonomi komunitas di Desa Wisata Sumber Maron. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh dari studi literatur berupa artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen akademik, dan publikasi lain yang relevan dengan konteks desa wisata dan teori Karl Polanyi.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka teoritik *embeddedness* dan tiga bentuk integrasi ekonomi ala Polanyi: *resiprositas*, *redistribusi*, dan *pertukaran pasar*. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana aktivitas ekonomi di desa ini tertanam dalam norma sosial, jaringan relasional, dan kelembagaan lokal yang membentuk dinamika ekonomi komunitas.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari BUMDes Tirta Agung (2023), Desa Wisata Sumber Maron mencatat lebih dari 200.000 kunjungan wisatawan selama tahun 2023, meningkat drastis dari sekitar 10.000 kunjungan pada tahun 2015. Peningkatan ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi desa, di mana pendapatan tahunan dari sektor wisata mencapai Rp 1,2 miliar. Sebanyak 60% warga desa kini terlibat dalam kegiatan usaha wisata dan UMKM pendukungnya, termasuk penyedia jasa makanan, penyewaan ban pelampung, parkir, hingga kerajinan tangan. Selain itu, dana dari sektor wisata digunakan untuk membiayai program sosial, pembangunan infrastruktur, dan pelatihan kewirausahaan yang menjangkau lebih dari 300 warga setiap tahunnya.

4.1. Resiprositas dalam Hubungan Sosial Ekonomi

Salah satu temuan utama dalam studi ini adalah kuatnya pola *resiprositas* dalam praktik ekonomi masyarakat Desa Wisata Sumber Maron. Bentuk *resiprositas* tercermin dari praktik gotong royong dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas wisata, serta dalam relasi antara pedagang, pengelola, dan masyarakat sekitar. Para pedagang saling berbagi informasi, menjaga harmoni ruang usaha, dan tidak saling berebut pengunjung secara agresif. Pengelola wisata pun memfasilitasi pembagian tempat usaha secara merata berdasarkan musyawarah warga, bukan logika kompetisi pasar bebas.

Pola-pola ini menunjukkan bahwa motif ekonomi warga tidak semata-mata bersifat individualistik, melainkan dipandu oleh norma timbal balik yang bersifat moral dan sosial. Dalam kerangka Polanyi, hal ini mencerminkan bentuk integrasi ekonomi melalui *resiprositas*, yakni pertukaran sosial dalam hubungan yang simetris dan saling menguntungkan (Polanyi, 1957). Meskipun transaksi ekonomi tetap berlangsung, hubungan sosial mendahului dan memberi arah pada bentuk pertukaran yang terjadi.

Resiprositas juga hadir dalam bentuk informal, seperti pinjam-meminjam peralatan dagang, bantuan tenaga saat perbaikan lapak, dan koordinasi jadwal usaha agar tidak tumpang tindih. Semua ini memperkuat kepercayaan dan solidaritas sosial yang menjadi fondasi ekonomi komunitas. Hal ini sesuai dengan temuan Granovetter (1985) bahwa relasi sosial yang kuat dapat menurunkan biaya transaksi dan menciptakan stabilitas dalam pasar lokal.

Selain memperkuat jaringan sosial, resiprositas juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Individu yang tidak mengikuti norma gotong royong cenderung dikucilkan atau tidak memperoleh dukungan dari komunitas. Dengan demikian, ekonomi lokal bukan hanya tentang produksi dan distribusi barang, tetapi juga proses sosial yang melibatkan norma dan pengakuan kolektif.

4.2. Redistribusi melalui Kelembagaan Desa

BUMDes sebagai lembaga resmi pengelola wisata berperan sentral dalam sistem redistribusi ekonomi di Sumber Maron. Pendapatan dari tiket masuk, parkir, dan penyewaan lapak tidak langsung masuk ke individu, melainkan dikelola secara kolektif oleh lembaga desa. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, fasilitas sanitasi, pelatihan UMKM, serta kegiatan sosial seperti santunan dan festival budaya lokal (Yuliani, 2022).

Redistribusi ini menciptakan sistem pemerataan manfaat yang tidak hanya berpihak pada pelaku ekonomi langsung, tetapi juga warga lain yang tidak terlibat secara aktif dalam wisata. Misalnya, petani yang tetap bekerja di ladang tetap menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur atau program sosial yang dibiayai dari pendapatan wisata. Dalam kerangka Polanyi, ini merupakan bentuk integrasi ekonomi melalui redistribusi yang mengikat ekonomi pada fungsi sosialnya (Polanyi, 1944).

Keterlibatan warga dalam musyawarah alokasi dana juga menunjukkan bahwa redistribusi bukan proses sepihak oleh elite desa, melainkan hasil partisipasi kolektif. Ini mendorong akuntabilitas dan menghindari konflik karena semua warga memiliki akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan. Redistribusi dalam konteks ini juga berfungsi sebagai sarana legitimasi sosial bagi lembaga pengelola. Selain fungsi ekonomi, redistribusi juga memperkuat kohesi sosial. Kegiatan-kegiatan kolektif yang dibiayai dari pendapatan desa, seperti peringatan hari besar atau pelatihan warga, memperkuat identitas komunal dan memperluas akses ke sumber daya. Redistribusi di Sumber Maron tidak hanya mencerminkan pemerataan ekonomi, tetapi juga reproduksi nilai sosial dan budaya komunitas.

4.3. Pertukaran Pasar dalam Skala Terbatas

Transaksi ekonomi antara pedagang dan wisatawan di Sumber Maron berlangsung dalam format pertukaran pasar. Namun, bentuk pasar yang berkembang di desa ini jauh dari ideal tipe pasar bebas yang kompetitif. Harga makanan, minuman, atau jasa seperti sewa ban dan parkir tidak ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme permintaan-penawaran, melainkan melalui kesepakatan dan norma bersama antar pelaku usaha.

Kesepakatan harga ini tidak tertulis tetapi disepakati secara kolektif oleh pedagang agar tidak terjadi praktik “banting harga” yang merusak solidaritas usaha

lokal. Dalam banyak kasus, warga senior atau tokoh masyarakat bertindak sebagai penengah jika muncul ketidaksepakatan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar diatur oleh struktur sosial dan norma informal, atau dalam istilah Polanyi, pasar tersebut “tertambat” (embedded) dalam masyarakat (Polanyi, 1957).

Selain harga, jenis barang yang dijual juga dikontrol oleh norma komunitas. Produk-produk yang dianggap tidak selaras dengan nilai lokal atau tidak ramah lingkungan biasanya tidak disarankan. Misalnya, penggunaan plastik sekali pakai atau produk konsumsi luar yang dianggap tidak sesuai dengan identitas desa. Hal ini memperlihatkan bahwa orientasi pasar diarahkan oleh kesadaran sosial dan budaya warga.

Dengan demikian, pasar di Sumber Maron beroperasi dalam ruang sosial yang memungkinkan kombinasi antara rasionalitas ekonomi dan etika kolektif. Bentuk pasar seperti ini merupakan contoh dari pasar tersemat (embedded market) yang menunjukkan bahwa logika ekonomi tidak sepenuhnya mendikte perilaku, tetapi berada dalam batas-batas sosial yang disepakati bersama.

4.4. Embeddedness dalam Konteks Budaya dan Nilai Lokal

Aktivitas ekonomi di Sumber Maron menunjukkan keterlekatan yang erat dengan nilai-nilai budaya lokal. Nilai gotong royong, kesopanan, tata krama, serta perhatian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan menjadi bagian dari kode etik bersama warga yang sekaligus diterapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Misalnya, kebiasaan menyambut pengunjung dengan ramah bukan hanya taktik dagang, tetapi ekspresi nilai budaya warga Karangsuko (Zulaikha, 2021).

Kegiatan ekonomi juga diiringi oleh kegiatan sosial-budaya seperti pelatihan kesenian, festival desa, dan pementasan budaya lokal yang tidak hanya berfungsi memperkuat daya tarik wisata, tetapi juga menjaga keberlanjutan warisan budaya. Dalam hal ini, identitas budaya dan praktik ekonomi saling memperkuat. Polanyi (1944) menegaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, ekonomi bukan institusi terpisah, melainkan bagian dari tatanan sosial dan simbolik.

Praktik ekonomi yang dilakukan warga juga mempertimbangkan aspek spiritual dan lingkungan. Misalnya, kegiatan wisata tidak dilakukan pada hari-hari tertentu yang dianggap sakral, dan beberapa area sumber air tidak digunakan secara komersial demi menjaga kehormatan terhadap alam. Ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai lokal tidak sekadar retorika, tetapi benar-benar memengaruhi struktur keputusan ekonomi.

Embeddedness dalam konteks budaya ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi desa sangat bergantung pada keberlanjutan nilai-nilai sosial dan budaya. Ketika ekonomi terlalu tersentral pada motif keuntungan, maka risiko terhadap kerusakan budaya dan disintegrasi sosial akan meningkat. Sumber Maron menjadi

contoh bagaimana ekonomi yang tertanam dalam nilai lokal dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Sumber Maron merupakan contoh konkret dari penerapan teori *embeddedness* dalam ekonomi komunitas, sebagaimana dikembangkan oleh Karl Polanyi. Aktivitas ekonomi di desa ini tidak berlangsung secara terpisah dari masyarakat, tetapi tertanam dalam struktur sosial, jaringan relasional, nilai budaya, dan kelembagaan lokal. Hal ini terlihat dalam cara warga mengelola wisata berbasis prinsip gotong royong, partisipasi kolektif, dan penguatan institusi desa seperti BUMDes.

Dari kerangka integrasi ekonomi ala Polanyi, dapat disimpulkan bahwa model yang dominan di Sumber Maron adalah resiprositas dan redistribusi, sementara pertukaran pasar tetap hadir tetapi berlangsung dalam batas-batas sosial yang dikendalikan oleh norma komunitas. Resiprositas terwujud dalam praktik gotong royong dan hubungan simetris antarwarga, sedangkan redistribusi tampak dalam peran kelembagaan desa dalam mengelola dan mendistribusikan pendapatan secara adil. Pertukaran pasar berjalan secara terbatas, tertanam dalam nilai-nilai sosial dan budaya lokal.

Temuan ini memberikan pelajaran penting bahwa keberlanjutan ekonomi desa tidak semata-mata ditentukan oleh daya kerja pasar atau investasi eksternal, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kekuatan sosial internal: solidaritas, kelembagaan lokal, dan nilai-nilai budaya. Dengan kata lain, ekonomi komunitas yang terlekat/ tertanam (*embedded*) memiliki kapasitas untuk lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan karena dijalankan oleh dan untuk masyarakat.

6. Rekomendasi

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pengembangan desa wisata di wilayah lain mengadopsi pendekatan yang mempertimbangkan keterlekatan ekonomi dengan struktur sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga lokal seperti BUMDes, membangun ruang-ruang partisipatif dalam pengambilan keputusan, serta memelihara nilai-nilai budaya sebagai bagian dari identitas dan sumber daya ekonomi. Tanpa penguatan dimensi sosial ini, pengembangan wisata berisiko menciptakan ketimpangan, eksklusi sosial, atau kerusakan identitas komunitas.

Dengan demikian, pendekatan *embeddedness* dapat menjadi landasan konseptual sekaligus strategi praktis dalam membangun ekonomi desa yang tangguh, adil, dan berakar pada kekuatan sosial komunitasnya.

7. Bibliografi

- BUMDes Tirta Agung. (2023). Laporan keuangan dan aktivitas operasional Desa Wisata Sumber Maron tahun 2023. Karangsono: BUMDes Tirta Agung.
- Dalton, G. (Ed.). (1961). *Primitive, archaic and modern economies: Essays of Karl Polanyi*. Garden City, NY: Anchor Books.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. (2023). Laporan tahunan pengembangan desa wisata Kabupaten Malang 2023. Malang: Disparbud Malang.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural involution: The process of ecological change in Indonesia*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <https://doi.org/10.1086/228311>
- Gunawan, I. (2019). Gotong royong sebagai modal sosial desa wisata: Studi kelembagaan di kawasan perdesaan Jawa. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(2), 55–67.
- Hidayat, A. (2020). Ekonomi komunitas dan desa wisata: Model pengelolaan partisipatif. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 12(1), 45–60.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). *Data dan status pengembangan desa wisata di Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenparekraf.
- Polanyi, K. (1944). *The great transformation: The political and economic origins of our time*. Boston, MA: Beacon Press.
- Polanyi, K., Arensberg, C. M., & Pearson, H. W. (Eds.). (1957). *Trade and market in the early empires: Economies in history and theory*. Glencoe, IL: Free Press.
- Sumaryono, B. (2018). Partisipasi warga dan nilai lokal dalam pengembangan desa wisata berbasis komunitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 33–49.
- Uzzi, B. (1996). The sources and consequences of embeddedness for the economic performance of organizations: The network effect. *American Sociological Review*, 61(4), 674–698. <https://doi.org/10.2307/2096399>
- Vel, J., & Bedner, A. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 village law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>
- Yuliani, D. (2022). Modal sosial dan peran BUMDes dalam pengembangan desa wisata Sumber Maron. *Jurnal Pembangunan Desa*, 5(2), 77–90.
- Zulaikha, S. (2021). *Kelembagaan dan partisipasi dalam pengelolaan ekowisata*. Malang: Universitas Brawijaya Press.